

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN  
PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau

OLEH

**KHUSNUL WAHIDA**

**NIM. 11624200506**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG PALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH."

Nama : KHUSNUL WAHIDA  
 NIM : 11624200506  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah

Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

14 Juli 2020  
 Pembimbing Skripsi

  
 Dr. Abu Samahy, M.H.  
 NIK: 130217087

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : KHUSNUL WAHIDA  
NIM : 11624200506  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : Jam, 08.30 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,



Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Arfan Zulfikar, M.Ag

Penguji  
Ade Faiz Fakhruallah, M.Ag

Penguji  
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**KHUSNUL WAHIDA**

**NIM:11624200506**

**KHUSNUL WAHIDA (2020) : IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

Adapun penulisan skripsi ini berlatang belakang dari banyaknya pengusaha sarang burung walet di kecamatan tualang yang belum memiliki izin usaha. UPTD selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan tidak melakukan pengawasan dengan baik dan bupati siak juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur dan bagaimana aktifitas pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni implementasi peraturan daerah pasal 23 nomor 4 tahun 2008 yang belum terwujud sepenuhnya terkait penanganan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang, dan tinjauan fiqh siyasah dalam penanganan izin usaha sarang burung walet yang di lakukan oleh UPTD kecamatan tualang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di BKD (Badan Keuangan Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Di kecamatan Tualang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak BKD, UPTD dan pengusaha walet. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait implemetasi perda pasal 23 nomor 4 tahun 2008 terhadap izin usaha sarang burung walet oleh Unit pelaksanaan teknis daerah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH.**”.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, “Bapak Saidina Ali” dan “Ibu Siti Mariyam”. Terima kasih atas do'a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Adik saya Raihanul Qalbi terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag, sebagai rektor UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Rahman Alwi M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Abu Samah M.H selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak Ade Fariz Fahrullah M,Ag selaku pembimbing proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai

7. Ibu Dra. Asmiwati M.A selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.

Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk Sahabat dan Teman-Teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sobat Ambyar (Sisi Afrina, Zikri Hidayatul Husni, Feni Hafiza, Desra Mardia), Jarwandri Aprianto, Gadis Kandis (Legi Rahma Fitri, Laras Sita Nuramri, Meidina Hasanah, Susmita Yulia, Windi Novitri Yulindra, Annisa Febriani), *Tobe The Perfect Muslimah* (Ulfa, Chici, Desi, Wita), Calon Istri Soleha, Keluarga Besar HTN Siyasah, HTN Siyasah'16, Beserta seluruh Sahabat dan Teman saya lainnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Penulis

KHUSNUL WAHIDA  
NIM : 11624200506

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Demografis kecamatan tualang.....	17
B. Gambaran umum demografi Badan Keuangan Daerah (BDK) Siak .....	22
C. Demografi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) .....	29
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Otonomi Daerah .....	32
B. Konsep Implementasi .....	33
C. Perizinan Usaha Burung Walet .....	35
D. Budidaya Sarang Burung Walet .....	36
E. Fiqih Siyasah .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Implementasi dan Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Penerapannya Di Kecamatan Tualang.....	54
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 23 .....	54
2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 23.....	62
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Siak Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Penerapannya Di Kecamatan Tualang. ....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL II.1</b> Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Berdasarkan Jabatan .....	28
---	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, itu berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara. Kemudian untuk mewujudkan Negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka perlunya realisasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Terkait realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (3) tersebut, maka dari itu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya yang biasa kita sebut dengan hierarki perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa Negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang menerapkan asas otonomi yang secara tidak langsung sudah diakomodasi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bunyi: ” pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam rangka merealisasikan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, maka dilahirkanlah undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah “hak kewenangan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Karena otonomi daerah berlaku didalam Negara kesatuan maka pada praktiknya melaksanakan asas desentralisasi.

Salah satu unsur penting dalam implementasinya yaitu adanya proses pembentukan daerah, yang mana sesuai bunyi undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 65 ayat (1d) kepala daerah mempunyai tugas : menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sejalan dengan kewenangan otonomi pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD), mengingat PAD sangat penting dalam penerimaan daerah sebagai cerminan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Kemandirian daerah dalam PAD tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja akan tetapi daerah juga diberikan keluasaan untuk menetapkan besarnya tarif atas pungutan sehingga akan mempengaruhi pengalokasian anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang terdapat dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah pastilah membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan keleluasaan kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang ada di daerah seperti yang berasal dari perpajakan, retribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lainnya yang sah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan ada pula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Warga negara sangat berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Dalam setiap sendi kehidupan dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Kabupaten Siak adalah tergolong daerah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun potensi alam yang dimaksud adalah burung walet. Bila dibudayakan burung walet ini konon sarangnya bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penangkaran sarang burung walet menjadi salah satu faktor potensial untuk

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

<sup>2</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), h. 128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memajukan perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penangkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Siak karena banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha penagkaran sarang burung walet, bangunan penangkaran sarang burung wallet Di Kabupaten Siak semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung walet.

Burung wallet merupakan satwa liar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam dan sesuai dengan keputusan menteri kehutanan nomor 100/KTPS-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung wallet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PDA) dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaran sarang burung wallet tersebut, dimana sarang burung wallet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Penangkaran sarang burung wallet di Kabupaten Siak tidak hanya berada di Ibukota Kabupaten Siak. Melainkan telah menyebar dibeberapa wilayah kecamatan salah satu kecamatan yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang burung wallet adalah di Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang, dan Kecamatan Sungai Apit.

<sup>3</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Pt . Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak terdiri atas 14 kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki pengusaha penangkaran sarang burung wallet yang lokasinya tidaklah berjauhan dari rumah penduduk. Di kabupaten siak terdapat 250 penangkaran sarang burung wallet berdasarkan data yang ada masih banyak yang belum memiliki legalitas yang lengkap. Hal ini berdasarkan keterangan Kabid KPTSP (kantor pelayanan terpadu satu pintu).

Pada peraturan daerah no 4 tahun 2008 tentang izin usaha sarang burung wallet di Kabupaten Siak pada pasal no 23 bagian pertama mengenai kewajiban dan larangan setiap orang atau badan usaha memiliki kewajiban atas hasil usahanya tersebut harus lah memiliki izin usaha dari kepala daerah akan tetapi yang di temukan masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan usaha sarang burung wallet nya, di lapangan pelestarian dan pengembangan habitat sarang burung wallet belum sepenuhnya sempurna dan masih belum berjalan dengan baik.

UPTD selaku lembaga yang bertanggung jawab di tiap kecamatan memiliki tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali kepada kepala daerah melalui dinas kehutanan akan tetapi di lapangan hanya di sampaikan setelah dirangkap selama satu tahun barulah diserahkan kepada kepala daerah.

Berkaitan dengan ini Yang mana pemerintah memiliki andil dalam pengimplementasian undang-undang yang berlaku tersebut. Pemerintah memiliki teknis untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintahan diartikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan, dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari suatu sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama.<sup>4</sup>

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibn Umar R.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

<sup>4</sup> Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2018),h.40



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.<sup>5</sup>

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Ditarik kesimpulan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.<sup>6</sup>

Seorang pemimpin harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara maupun pancasila sebagai ideologi Negara merupakan lima poin yang dijadikan dasar Negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, baik penegakan hukum, beragama, dan tolong-menolong antar warga negara.

<sup>5</sup> Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol.5.No 2./2017 h.45

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009) h.225

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan permasalahan ini telah diatur ke dalam ketentuan fiqh siyasah dimana siyasah yang lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan. Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak memilih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah Swt.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dalam Fiqh Siyasah ini tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Siak dengan adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Dari uraian diatas bahwasannya Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diundangkan dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar

<sup>7</sup> A.Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung;Kencana,2003),39

<sup>8</sup> Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta:Erlangga,2008),h.97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Dimana dalam hal ini penulis masih menemui kebijakan dari pemerintah Daerah Khususnya terfokus pada peraturan daerah pada pasal 23 nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan sarang burung walet di kecamatan tualang

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mendalami masalah tersebut lebih lanjut tentang masalah Implementasi peraturan daerah siak pada pasal 23 no 4 tahun 2008 di Kecamatan Tualang tentang izin pengusahaan sarang burung walet terkhusus daerah Kecamatan Tualang di Kabupaten Siak, dituahkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH.”**

#### Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini dalam implementasi pasal 23 nomor 4 tahun 2008 peraturan daerah siak tentang izin pengusahaan sarang burung walet berdasarkan kewajiban dan larangan pengusahaan penangkaran burung walet di Kecamatan Tualang dan dari tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tualang karena pada daerah ini terdapat banyak pengusaha sarang burung walet.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Siak Di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Siak Dalam Penerapannya Di Kecamatan Tualang?

## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Siak di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang

### 2) Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian maka menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data skunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>9</sup> Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di BKD dan UPTD kecamatan tualang kabupaten siak. Selain itu lokasi sangatlah mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan obeservasi, wawancara, mengenai permasalahan.

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek dari penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Persada, 2003).Cet. ke-  
1, h. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet Kabupaten Siak.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara mengenai permasalahan implementasi pasal 23 nomor 4 tahun 2008 peraturan daerah tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet Kabupaten Siak

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan data secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) pelaksanaan *sampel random sampling* disebabkan anggota populasi penelitian ini dianggap homogen karena sampel yang diambil adalah pengusaha sarang burung walet yang telah memiliki izin usaha pengkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

Populasi dilapangan terdapat 85 orang pengusaha sarang burung walet yang terdata dikecamatan tualang dan populasi staf bkd sebanyak 97 orang dan 15 orang staf UPTD.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel yang penulis digunakan adalah, 2 orang staf BKD (Badan Keuangan Daerah), 1 orang kepala unit pelaksanaan teknis pendapatan daerah, 2 orang pegawai UPTD, 10 orang pengusaha sarang burung wallet (5 pengusaha yang memiliki izin dan 5 pengusaha yang tidak memiliki izin usaha

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi

<sup>11</sup> Amiruddin, *Op Cit.* hlm.30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.

#### b. Wawancara

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada seorang responden<sup>12</sup>.

#### 6. Metode Analisa Data

Data yang dianalisa melalui metode: analisis data kualitatif adalah dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian di uraikan antara data yang satu dengan yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### 7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

<sup>12</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## 8. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisikan uraian tinjauan tentang analisa pelayanan aparatur pemerintahan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) bagian pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah, struktur kepegawaian, tugas dan wewenang pemerintahan, faktor penyebab munculnya masalah kurangnya sosialisasi tentang implementasi izin usaha penangkaran sarang burung walet.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini membahas tentang sarana dan prasarana Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, standar pelayanan, proses pelayanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran pajak sarang burung wallet , dan membahas tentang masalah yang dihadapi para petugas terhadap penerapan izin usaha penagkaran sarang burung wallet pada masyarakat

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis membahas tentang bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelayanan di Kantor unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bagian Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak dan Demografis Kecamatan Tualang

Kecamatan tualang kabupaten siak merupakan salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah No.13 tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak, tentang pemekaran wilayah dari Kecamatan Siak dengan luas wilayah Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' lintang utara 101°28'-101°52' bujur timur dengan luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu 373,75 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur. Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Minas
2. Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam
3. Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru
4. Timur : Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam

Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) kampung dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan jarak kampung paling jauh dari pusat pemerintahan kecamatan hanya lebih kurang 15 km dan hanya 2 (dua) kampung saja yaitu kampung Maredan dan Tualang.<sup>13</sup> Dalam tahun 2003 Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 3 kecamatan menjadi 8 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

<sup>13</sup> Kecamatan Tualang dalam angka 2018,, <http://siakkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 juli 2020 pada pukul 13.36 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kecamatan Siak dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Tualang;
  - b. Dayun;
  - c. Kerinci Kanan dan
  - d. Lubuk Dalam.
2. Kecamatan Minas dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Minas
  - b. Kecamatan Sei Mandau.
3. Kecamatan Sungai Siak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Sungai Apit dan
  - b. Bunga Raya.<sup>14</sup>
4. Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan siak, yang dimekarkan menjadi 13 kecamatan :
  1. Kecamatan Siak;
  2. Tualang;
  3. Kerinci Kanan;
  4. Dayun;
  5. Sungai Apit;
  6. Minas;

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/perawang.tualang.siak> di akses pada tanggal 5 juli 2020 pada pukul 14.00 WIB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kandis;
8. Mandau;
9. Mempura;
10. Sabak Auh;
11. Bunga Raya;
12. Koto Gasib, dan
13. Kecamatan Lubuk Dalam.

Terbentuknya kecamatan tualang ini terdiri dari beberapa desa yaitu:

1. Desa tualang dengan jumlah penduduk 15,714
2. Desa perawang dengan jumlah penduduk 43,466
3. Desa perawang barat dengan jumlah penduduk 23,272
4. Desa maredan dengan jumlah penduduk 3,460
5. Desa maredan barat dengan jumlah penduduk 2,744
6. Desa Pinang sebatang dengan jumlah penduduk 3,943
7. Desa Pinang sebatang barat dengan jumlah penduduk 5,422
8. Desa Pinang sebatang timur dengan jumlah penduduk 8,909
9. Tualang timur dengan jumlah penduduk 4,854.<sup>15</sup>

Kabupaten Siak mempunyai beraneka macam bentuk ekosistem daratan dan perairan seperti hutan, rawa, sungai dan danau. Sebagian besar daratan berbentuk daratan rendah dan rawa gambut.

<sup>15</sup> Kecamatan Tualang dalam angka 2018 hlm.5., <http://siakkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 juli 2020 pada pukul 13.36 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan tualang merupakan kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah No.13 tahun 2001, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam yang terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Tualang ini memiliki banyak potensi untuk berkembang dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah desa Perawang dari Sembilan kecamatan lainnya.

Kecamatan Tualang dilalui oleh jalan raya penghubung perawang-pekanbaru yang mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat tualang. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan tualang. Untuk menopang hidupnya, penduduk Kecamatan Tualang yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu: Desa tualang, Desa perawang, Desa perawang, Desa maredan, Desa maredan barat, Desa Pinang sebatang, Desa Pinang sebatang barat, Desa Pinang sebatang timur, Tualang timur pada umumnya Kecamatan Tualang ini mayoritas hidupnya dengan mata pencaharian karyawan swasta di *PT Indah Kiat Pulp And Paper* (PT IKPP) tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pedagang, petani dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

Kecamatan Tualang yang memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, akan tetapi suku melayu yang dominan, serta suku ocu, jawa dan minang, ini karena banyak masyarakat dari luar kabupaten siak yang menetap di

<sup>16</sup> Ibid h.47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan tualang dan kecamatan lainnya.<sup>17</sup> dan karena adanya jalan lalu lintas yang menghubungkan perawang dan pekanbaru yang akan mempengaruhi mobilitas masyarakat di Kecamatan Tualang dan keadaan sosialnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Tualang disajikan mengenai data pendidikan meliputi TK Negeri 11 Swasta 42 sekolah, SD Negeri 20 Swasta 18 sekolah, SMP Negeri 13 Swasta 13 sekolah, SMA Negeri 5 Swasta 1 sekolah, SMK Swasta 6 sekolah.<sup>18</sup>

#### 2. Tempat ibadah

Data dari kementrian agama menunjukkan bahwa pada tahun 2017 di kecamatan tualang terdapat 41 tempat ibadah, baik itu Masjid, Surau/Musholla. Gereja, Vihara/Kelenteng, Pura.

#### 3. Kesehatan

Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian pemerintahnya, terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan. Terjaminnya kesehatan masyarakat tidak hanya diperoleh dari fasilitas yang ada, tetapi juga tenaga kesehatan yang tersedia dan mencukupi kebutuhan. Dengan demikian peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dipenuhi. Pada tahun 2016 di Kecamatan Tualang terdapat 2 puskesmas, 3 puskesmas keliling dan 7 puskesmas pembantu. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat di Kampung

<sup>17</sup> Ibid h 22

<sup>18</sup> Ibid h.22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat 8 polindes dan 52 posyandu. Tenaga paramedis yang terdapat di Kecamatan Tualang adalah 7 orang dokter gigi dan 11 orang dokter umum dengan 58 orang perawat. Sedangkan untuk pelayanan persalinan 26 orang bidan dan 16 orang dukun bayi.<sup>19</sup>

Kecamatan Tualang juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan peternakan, industri kecil maupun industri besar serta salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di kecamatan tualang mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di kecamatan tualang, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 7 pasar, dan begitu pula dengan sarana ekonomi.

## **B. Gambaran umum demografi Badan Keuangan Daerah (BDK) Siak**

### **a. Sejarah singkat badan keuangan daerah**

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Badan Keuangan Daerah

<sup>19</sup> *Ibid*, h.29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah adalah Dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Pengelola keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012. Sebagai unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan keuangan daerah kabupaten siak hlm.29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
4. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas.
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>21</sup>

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan porsi pendapatan asli daerah terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah Tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah Terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh sebagai wujud dari tanggung jawab dan koordinasi Badan Keuangan Daerah dalam bentuk visi dan misi.

**b. Visi Badan Keuangan Daerah**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ditetapkan Visi sebagai berikut "*Terwujudnya optimalisasi pendapatan Daerah melalui aparat yang ramah tamah, professional dan inovatif*".

- a. Optimalisasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ramah: Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
- c. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (*skill*) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.<sup>22</sup>

**c. Misi Badan Keuangan Daerah**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan produktivitas.

<sup>22</sup> [https:// repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id) diakses pada tanggal 5 juli 2020 pukul 15.11 WIB



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.<sup>23</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

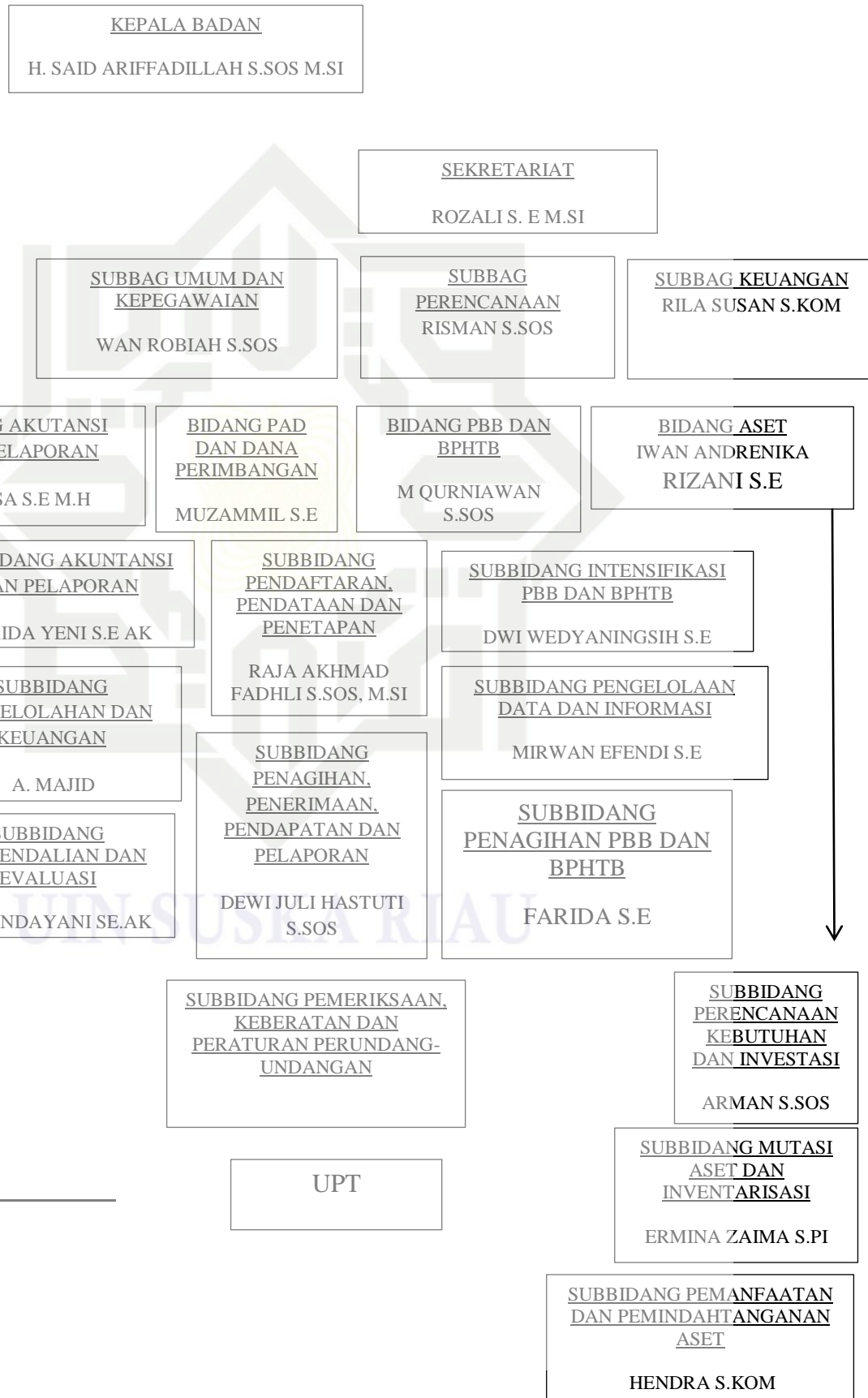
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber BKD SIAK



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2018 sebanyak 97 orang atau 1,74 % dari keseluruhan jumlah pegawai Kabupaten Siak Tahun 2018 Sedangkan menurut posisi jabatan Badan Keuangan Kabupaten Siak memiliki 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 21 orang pejabat eselon IV, 4 orang 7 fungsional perencana dan 27 orang fungsional umum.<sup>24</sup>

**TABEL II.1**  
**Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Kepala Badan Eselon II.b	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai eselon III.b	6	-	6
3.	Kepala Subbag/Subbid Eselon	8	8	16
4.	IV.a	5	-	5
5.	Kepala Tata Usaha IV.a	1	3	4
6.	Kepala Subbag Tata Usaha IV.b Fungsional Umum	41	24	65
<b>J U M L A H</b>		<b>62</b>	<b>35</b>	<b>97</b>

SUMBER: BKD SIAK

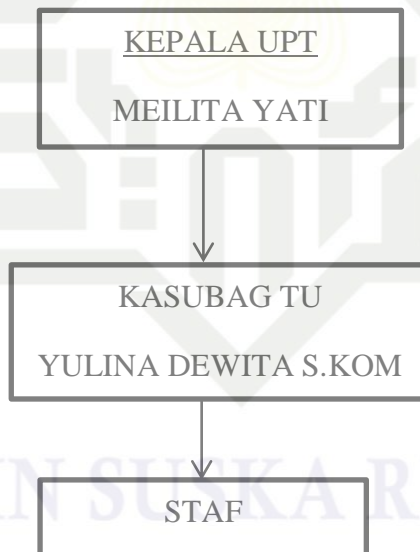
<sup>24</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan keuangan daerah kabupaten siak hlm.22

### C. Demografi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

#### 1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang Kabupaten Siak yang beralamat Jalan Raya Km. 6 No. 2 Perawang Kab. Siak. Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan, dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

#### Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang



SUMBER: UPTD kecamatan tualang

#### a. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang berdiri pada tahun 2000 yang mana dahulunya kantor ini bernama Unit Pelaksana (UP) yang masih berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Siak. Sesuai Peraturan Gubernur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau NO. 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau maka terbentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang memiliki wilayah kerja yaitu Seluruh Kabupaten Siak.

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, yaitu :

1. Kecamatan Tualang
2. Kecamatan Minas
3. Kecamatan Koto Gasib
4. Kecamatan Lubuk Dalam
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Kerinci Kanan
7. Kecamatan Kandis
8. Kecamatan Mempura

**b. Lokasi Geografis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang**

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang Kab. Siak. Kantor Pemerintah ini dibagian barat berhadapan dengan Terminal Perawang, bagian timur berbatasan dengan Rumah Sakit Bidan Bulan, bagian utara bersebelahan dengan Dearler Yamaha dan bagian selatan bersebelahan dengan Perumahan Warga. Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia.

**c. Visi dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang**

1. Visi Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan yang dibanggakan masyarakat.
2. Misi Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid hlm.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Otonomi Daerah

Dalam kamus ilmiah populer kata "otonomo" berarti badan (daerah) yang mendapat hak otonomi, sementara "otonomi" mengandung arti mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri.

Secara terminologi, otonomi berarti: bebas, sering pula disebut dengan hak untuk menentukan sendiri dalam kebebasan moral dan pemikiran religius, atau hak memerintah sendiri (*self Government*) bagian dari suatu kota, negara atau bangsa.

Sementara itu dalam konteks otonomi daerah, otonomi adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengelola daerahnya dengan baik, pemerintah tidak bersifat sentralistik akan tetapi desentralisasi.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan. Atau pemusatan semua kewenangan pemerintah politik dan administrasi atas pemerintahan pemerintah pusat.

<sup>26</sup> Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), h.40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**B. Konsep Implementasi****1. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.

Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Dan implementasi akan sesuai dengan sistem dan mekanismenya. Tujuan utama implementasi untuk menerapkan rencana yang telah disusun, dalam menyusun rencana memiliki tujuan tujuan yang akan dicapai, dan menguji suatu prosedur dalam kebijakan, dan menguji kemampuan masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang disusun, dan untuk mengetahui keberhasilan itu sendiri. Dan diharapkan sistem tersebut nantinya akan semakin terjamin untuk penggunaannya dimasa depan.

## **2. Implemetasi peraturan daerah pasal 23 nomor 4 tahun 2008**

Pada bab 9 tentang kewajiban dan larangan pasal 23 bagian pertama mengatakan. “ setiap orang atau badan usaha penangkaran sarang burung wallet berkewajiban untuk :

- a. mendapatkan izin dari kepala daerah
- b. melaksanakan pelestarian, pengembangan habitat dan populasi burung wallet

<sup>27</sup> [http:// repository.uma. ac.id](http://repository.uma.ac.id) diakses pada tanggal 7 juli 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 ( enam) bulan sekali kepada kepala daerah melalui kepala dinas kehutanan
- d. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada kepala daerah ,melalui BAPEDALDA
- e. menjaga dan memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan, agar masyarakat terhindar dari bahaya pencemaran
- f. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

**C. Perizinan Usaha Burung Walet**

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Sedangkan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>30</sup> Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktifitas-aktifitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat

<sup>28</sup> Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008

<sup>29</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Lampung, Universitas Negeri Lampung, 1992, h. 45

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberi kewenangan. Tetapi tujuan dari perizinan dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:<sup>31</sup>

- a. Sisi Pemerintahan
  - i. Untuk melaksanakan peraturan.
  - ii. Sebagai sumber pendapatan daerah
- b. Sisi Kemasyarakatan
  - i. Untuk adanya kepastian hukum.
  - ii. Untuk adanya kepastian hak.
  - iii. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

**D. Budidaya Sarang Burung Walet**

Di habitat aslinya walet tinggal di dalam goa-goa pantai berkarang yang terjal atau tebing dan bukit yang curam mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Suhu didalam goa tempat tinggalnya berkisar antara 26-29°C dan kelembapannya 8-95%.<sup>32</sup> Keuntungan pembangunan gedung sarang walet. Di dalam goa, walet jantan dan walet betina akan membuat sarang secara bergantian menggunakan liurnya. Sebuah sarang walet dalam waktu 40-80 hari. Sekitar 5 -8 hari setelah kawin, betina akan bertelur. Sarang walet dibuat dilangit-langit goa yang tinggi dan gelap.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 200

<sup>32</sup> Philip Yamin & Ferry B. Paimin, *Membangun Rumah walet Bintang 5*, Depok, Penebar Swadaya, 2002, hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dalam rangka mengambil dan atau memanfaatkan Sarang Burung Walet. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (In-Situ) maupun di habitat buatan (Ex-Situ) bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet.

Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola sarang burung walet pada habitat alami atau diluar habitat alami; Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sarang burung walet habitat buatan adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengelola pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet dan berada diluar habitat alami; Pengelola Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi sarang Burung Walet.

Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan atau habitat buatan yang dilaksanakan oleh Pengusaha. Pemanenan sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Panen rampasan adalah sistem pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet sempurna dibuat dan belum berisi telur. Panen Tetasan adalah sistem pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah anak Burung Walet menetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri.<sup>33</sup>

Perkembangan waktu, teknologi dan pola pikir manusia sehingga mulai terciptanya inovasi membuat sarang walet buatan untuk pemanfaatan sarang burung walet dengan cara membuat media sarang walet dari gedung-gedung yang didalamnya dibuat semirip mungkin dengan habitat asli burung walet. Namun, upaya pembuatan gedung sarang walet ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Keuntungan pembangunan gedung sarang walet.

Membangun gedung sarang walet khusus sebagai tempat tinggal akan lebih menguntungkan dari pada memanfaatkan sarang walet hanya dari mengambil didalam goa dengan beberapa keuntungan seperti.

- b. Mutu sarang walet lebih baik.

Sarang walet yang dihasilkan dari gedung sarang walet memiliki mutu yang lebih baik dan bentuk yang lebih sempurna. Dari warnanya, sarang yang dihasilkan dari gedung sarang walet lebih berwarna putih, sedangkan sarang yang dihasilkan dari goa berwarna lebih kecoklatan dan kusam.

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Pengelolaan dan pengawasan lebih mudah.

Pengelolaan sarang walet digedung sarang walet lebih mudah daripada di goa walet. Hal ini lebih terlihat dari kemudahan letak, dan jarak antara rumah pengelola dengan sarang walet. Selain itu pengawasan terhadap keamanan dari pencurian sarang walet akan lebih mudah, karena harga sarang walet yang begitu tinggi dan juga pengawasan terhadap hama dan kebersihan sarang walet lebih mudah dikontrol.<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal 13 perda Nomor 4 tahun 2008 tentang izin sarang burung walet, Objek adalah Izin Sarang Burung Walet oleh pribadi atau badan di lokasi tertentu, berupa Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet ditetapkan Kepala Daerah; Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan;
- b. *Advices planing* dari Bappeda;
- c. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;

<sup>34</sup> *Ibid*, h.8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- k. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.<sup>35</sup>

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan; Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Kemudian pada pasal 15 perda nomor 4 tahun 2008 mengenai biaya retribusi perizinan ditetapkan bahwa setiap izin yang di terbitkan oleh Bupati dikenai biaya sebagai berikut:

- a. Izin awal untuk habitat alami dikenakan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Izin awal untuk habitat buatan; untuk usaha yang telah ada dikenakan biaya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk yang akan berusaha dikenai biaya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- c. Untuk memperpanjang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet maka akan di kenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus rupiah)

<sup>35</sup> Pasal 13 perda nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa berlaku dari izin usaha yang telah diajukan kepada kepala daerah akan berlaku selama 5 tahun dan hasil dari penerimaan biaya retribusi nantinya akan disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.<sup>36</sup>

Semua pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada sebelum disahkan peraturan daerah diberikan kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan dan diberikan masa kepengurusan perizinan paling lama 3 tahun.<sup>37</sup>

Pada pasal 26 tentang ketentuan pidana yang diberikan kepada setiap atau badan usaha yang melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan maka akan diberikan hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan kemudian akan dikenakan denda sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan dasar pemidanaan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Kata “*fuqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu

<sup>36</sup> Pasal 14 dan pasal 16 perda nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet

<sup>37</sup> Pasal 27 perda nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).<sup>38</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (waris), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional).<sup>39</sup>

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu,, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan,

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2-3

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.<sup>40</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>41</sup>

Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai khilafah di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Q.S Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25-26

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin, Opcit..* h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Memakmurkan bumi berarti pula mengatur dan mengendalikan bumi ini secara siyasah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik, meskipun proses pengangkatan pemimpin masih menjadi polemik yang diperdebatkan sampai sekarang.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

<sup>42</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2007), h. 173

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>43</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul “*al-ahkam al-sulthaniyyah*”, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah Idariyah* (administrasi negara)

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
- b. *Siyasah Idariyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah Dauliyah/Kharijiyyah* (hubungan internasional)

<sup>43</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 26

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyah* (hubungan internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (keuangan negara)

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Imam Amrusi Jalani, dkk..., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 15-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

**3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah**

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>45</sup>

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>46</sup>

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, 'urf, 'adah, mashlahah mursalah, dan istishab*.<sup>47</sup> Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

#### 4. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Opcit....* h. 16

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah...* h. 29

<sup>48</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1994), h. 65

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”*

Berdasarkan kaidah ini pemerintah Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.<sup>49</sup>

*“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.*

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

العادة محكمة.<sup>50</sup>

*“Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.”*

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan

<sup>49</sup> Ibid, h. 157

<sup>50</sup> Ibid, h. 27

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun adat disini yang dapat dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan semangat roh syariat Islam.

درء المفسد اولى من جلب المصالح.<sup>51</sup>

*“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.”*

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.<sup>52</sup>

*“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).”*

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan dan tidak mementingkan kemaslahatan kelompok tertentu.

## 5. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 207

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 53



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 177-178

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>54</sup>

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada didalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A.Jazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.<sup>55</sup>

## 6. Konsep Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Kekuasaan (*sulthah*) dala konsep negara Islam, oleh Abdul Wahhab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang

<sup>54</sup> A.Djazuli, *Opcit*, h.47

<sup>55</sup> Imam Amrusi Jalani, dkk..., *Hukum Tata Opcit*....h. 25-27

<sup>56</sup> *Ibid* h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

*Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *wilayah al-mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>57</sup> *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Imam Al-Mawardi menyimpulkan, *wilayah al-mazalim* memiliki beberapa kewenangan. *Pertama*, memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya. Mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak tidak jujur. *Kedua*, melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan para pegawai dan perangkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas pungutan dana untuk negara. *Ketiga*, memeriksa para pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara. *Keempat*, mengontrol secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah serta

<sup>57</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta; Amzah, 2012), h. 113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum lainnya. *Kelima*, mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil oleh para aparat negara.<sup>58</sup>

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *wilayah al-mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, TT), h. 71

<sup>59</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan daerah masih belum sepenuhnya terwujud. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet, berupa pendataan secara teratur kelengkapan. Masyarakat masih ada yang belum ada yang belum mendaftarkan usaha sarang burung walet yang mereka miliki, perlunya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, perlunya penambahan pegawai yang bertugas dalam mengawasi perkembangan walet dilapangan.
2. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah fiqh siyasah dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan maslahtul mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini UPTD belum efektif dalam menangani permasalahan penerapan izin usaha penangkaran sarang burung walet.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar pengimplementasian terhadap izin usaha sarang burung walet berjalan dengan efektif

yang dilakukan oleh UPTD Dinas pendapatan pengelolaan aset daerah, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab penanganan tersebut tidak efektif. Dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi secara teratur untuk mencapainya terdatanya secara keseluruhan masyarakat yang memiliki usaha sarang burung wallet. Melakukan penambahan petugas yang melakukan pengawasan dan pendataan dilapangan agar data yang di dapat terdata dengan baik.
2. Perlunya kesadaran UPTD Dalam Mentaati Peraturan Yang Telah Ditetapkan agar implementasi peraturan daerah terlaksana dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta; Amzah, 2012)

Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2018)

Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, TT)

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1994)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( jakarta: PT Rajawali Persada, 2003).

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002)

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*,(Bandung:CV Pustaka Media,2007)

Firdaus, SH.MH .*Pancasila*,(Pekanbaru:Suska Press:2010)

Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Penerbit. PT Grasindo

H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

Imam Amrusi Jalani, dkk..., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan keuangan daerah kabupaten siak tahun 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyarah doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol.5.No 2./2017

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993

Philip Yamin & Ferry B. Paimin, *Membangun Rumah walet Bintang 5*, Depok, Penebar Swadaya, 2002

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Lampung, Universitas Negeri Lampung, 1992

Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999)

Wanto, Devid Prestia. 2017. Analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten siak nomor 4 tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di kecamatan tualang. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999)

#### Undang-Undang

Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin usaha penangkaran sarang burung walet

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemekaran wilayah

#### Internet

[https:// repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id) diakses pada tanggal 5 juli 2020 pukul 15.11 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[http:// repository.uma. ac.id](http://repository.uma.ac.id) diakses pada tanggal 7 juli 2020

<https://siakkab.go.id/pendapatan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah> dial  
tanggal 15 desember 2019 la

<https://ekonomi.bisnis.com> diakses pada tanggal 15 desember 2019

<https://repository.usd.ac.id> diakses pada tanggal 15 desember 2019

*Kecamatan Tualang* dalam angka 2018,, <http://siakkab.bps.go.id>, diakses pada  
tanggal 5 juli 2020 pada pukul 13.36 WIB

[www.qalbu-islam.blogspot.com](http://www.qalbu-islam.blogspot.com), diakses pada tanggal 20 mei 2020 pukul 21.32 WIB



UIN SUSKA RIAU

## Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama oleh Kepala Bagian Pendaftaran dan Penetapan Bagian  
Keuangan Daerah (BKD)



Wawancara bersama staff BKD (Badan keuangan daerah)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara bersama KASUBAG TU Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah



### Wawancara bersama pengusaha sarang burung walet







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN  
PENGANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : KHUSNUL WAHIDA  
NIM : 11624200506  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : Jam, 08.30 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua : H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris : Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I : Ade Fadz Fakhruallah, M.Ag

Penguji II : Dr. Hj Hertina, M.Pd


Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Jalinus, S.Ag**

NIP. 119750801 200701 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No. : 04/F.I/PP.00.9/9974/2019

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Sifat : Biasa

Jumlah : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: KHUSNUL WAHIDA
NIM	: 11624200506
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: UPT Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan efektifitas unit pelaksana teknis (upt) dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah terhadap pajak sarang burung walet di kecamatan tualang kabupaten siak dalam perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29192  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca dan mempertimbangkan Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100/F.I/PP.09/9974/2019 Tanggal 20 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

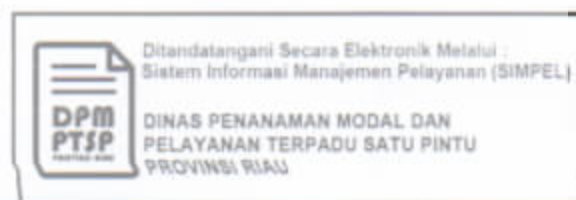
1. Nama : KHUSNUL WAHIDA
2. NIM / KTP : 11624200506
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KAMPAR
6. Judul Penelitian : TINJAUAN EFEKTIFITAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II  
SIAK SRI INDRAPURA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

070/Kesbangpol/24

### Rekomendasi Riset

Kepada Yth:  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Siak

di -

Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29192 Tanggal 20 Desember 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : KHUSNUL WAHIDA  
NIM : 11624200506  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : TINJAUAN EFEKTIFITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 25 Februari 2020

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK  
Kasi Kesatuan Bangsa

AWALUDDIN, SE

NIP. 19771213 201102 1 001



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**KHUSNUL WAHIDA**, Lahir di Tambang pada tanggal 28 Maret 1998. Anak Pertama dari dua Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Saidina Ali dan ibu Siti Mariyam. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN Muhammadiyah, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Dar El Hikmah Pekanbaru , Riau, 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Dar El Hikmah, dan lulus pada tahun 2016.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang Dalam Perspektif Siyasaah.”** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).